

Talitha Andwi Aswari

Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta
Email: talithaaswa@gmail.com

Awang Darumurti

Dosen Magister Ilmu Pemerintahan Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta
Email: awang.darumurti@yahoo.com

Kurnia Rifqi Febrian

Magister Ilmu Pemerintahan Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta
Email: kurniarifqifebrian@yahoo.com

AGENDA SETTING PROGRAM ONE VILLAGE ONE PRODUCT (OVOP) KABUPATEN BANTUL

<https://doi.org/10.18196/jgpp.4387>

ABSTRAK

Program One Village One Product atau OVOP adalah suatu program yang diinisiasi Dr.Morihiro Hiramatsu. Salah satu daerah di Indonesia yang melaksanakan OVOP adalah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menerapkan program OVOP sebagai upaya mengentaskan kemiskinan dengan memberdayakan kemampuan masyarakat miskin pada produk tertentu dan meningkatkan pendapatan mereka. Penelitian ini difokuskan pada tahap Agenda Setting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses Agenda Setting program One Village One Product (OVOP) di Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada narasumber-narasumber yang mewakili institusi mereka, dan semuanya terlibat di dalam proses Agenda Setting program OVOP, sedangkan observasi dilakukan kepada kelompok usaha yang mengikuti program OVOP. Dokumentasi dilakukan kepada dokumen-dokumen terkait dengan OVOP seperti draft kebijakan, data kemiskinan, dan lain-lain. Hal-hal yang dapat dianalisa dengan ketiga teknik pengumpulan data di atas, yaitu: metode Agenda Setting program OVOP, teknik menyusun prioritas masalah publik terkait OVOP, dan proses Agenda Setting program OVOP yang melibatkan Three Stream Theory. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan hasil bahwa Agenda Setting Program OVOP Kabupaten Bantul menggunakan metode Quick Decision Analysis. Sedangkan Teknik Penyusunan Prioritas Masalah Publik yang digunakan yakni melewati tahap penyusunan prioritas masalah publik, penilaian oleh stakeholders terhadap alternatif kebijakan, dan penyimpulan prioritas masalah. Proses Agenda Setting menurut Three Stream Theory, yaitu dari segi Problem Stream, diketahui pemetaan masalah dilakukan oleh BAPPEDA Bantul. Apabila dari Policy Stream, single-issue yang menjadi latar belakang adalah isu kemiskinan yang kemudian dikaji lalu menghasilkan program OVOP. Apabila dari Politics Stream, program ini mendapatkan dukungan semua fraksi di DPRD Bantul dan penganggarannya masuk di dalam RKA-SKPD yang mengampu yang kemudian masuk di dalam KUA-PPAS dan APBD.

Keywords: Agenda Setting, Program, Kebijakan, One Village One Product, OVOP, Bantul

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Bantul mengadopsi program OVOP mulai tahun 2013, dimana masing-masing kecamatan diminta menggali Potensi Andalan Setempat (PAS) yang dapat dikembangkan untuk menggerakkan roda ekonomi. Program OVOP ini merupakan salah satu upaya untuk menekan angka kemiskinan sebagaimana yang

telah disebutkan di atas. Seperti yang diketahui bahwa sasaran dari program OVOP ini adalah KK miskin yang ada di Kabupaten Bantul.

Salah satu hal yang penting di dalam implementasi program OVOP adalah pada saat pemilihan potensi ekonomi. Proses ini diserahkan sepenuhnya pada masyarakat. Karena masyarakat yang lebih merasakan potensi ekonomi mana yang mungkin bisa dikembangkan dan bisa mendapatkan nilai tambah. Setelah mendapatkan potensi yang diharapkan maka kemudian diwujudkan dalam kelompok-kelompok UKM di kecamatan-kecamatan yang ada di Bantul. Setelah itu SKPD akan turun langsung dan memberikan bimbingan kepada kelompok-kelompok tersebut.

Program OVOP yang diadopsi dari Jepang ini menarik untuk diteliti. Selain karena merupakan program yang berbasis *pro-poor*, program ini juga mendorong besarnya intensitas keterlibatan masyarakat untuk turut memajukan perekonomian keluarga maupun daerahnya. Masyarakat diposisikan sebagai aktor dan SKPD serta pemerintah lebih bersifat sebagai fasilitator.

Tahapan yang paling strategis dari keseluruhan tahapan *policy making* adalah *Agenda Setting* atau tahapan penyusunan agenda. Sehingga penelitian terkait dengan program OVOP ini lebih difokuskan kepada proses perumusan kebijakannya, tepatnya pada tahap *Agenda Setting*. Program OVOP yang sangat pro rakyat ini perlu diketahui lebih jauh mengenai isu-isu yang diperhitungkan yang kemudian menghasilkan kebijakan publik berupa program OVOP yang strategik tersebut.

Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Bantul terkait dengan program OVOP ini dikarenakan Kabupaten Bantul mengimplementasikan Program OVOP ini sebagai upaya mengentaskan kemiskinan tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penguatan potensi ekonomi lokal semata. Hal lain yang membuat Kabupaten Bantul cukup berbeda dengan daerah lain dalam menerapkan OVOP yaitu kesesuaian Program OVOP dengan branding yang dimiliki oleh Kabupaten Bantul yaitu *The Harmony Of Nature and Culture* yang dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai “Harmoni Alam dan Budaya”, dimana Program OVOP sendiri mendorong sasaran program yaitu masyarakat miskin di desa-desa di Kabupaten Bantul untuk membuat produk andalan dari dengan muatan kearifan lokal dan budaya serta menggunakan bahan baku dari daerah Bantul.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

Mengetahui proses *Agenda Setting* program *One Village One Product* (OVOP) di Kabupaten Bantul

B. KERANGKA DASAR TEORI

1. Teori *Agenda Setting*

1.1 Pengertian *Agenda Setting*

Menurut William Dunn, *Agenda Setting* adalah proses tempat dimana ada ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan agenda publik, jika sebuah isu telah menjadi masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.¹ *Agenda Setting* adalah suatu proses menyusun agenda kebijakan pemerintah berdasarkan daftar isu-isu publik. Daftar isu-isu publik tersebut dibuat skala prioritas untuk kemudian dapat diketahui mana saja isu publik yang dapat menjadi masalah publik yang kemudian masuk dalam agenda kebijakan.

1.2 Teori *Agenda Setting* John Kingdon

²Menurut teori *Agenda Setting* John Kingdon, *Agenda Setting* adalah tahap pertama dalam proses kebijakan. Agenda kebijakan adalah daftar masalah atau isu-isu yang menjadi perhatian serius pejabat pemerintah, atau orang-orang yang membuat keputusan.

John Kingdon menjelaskan pendekatan baru dalam analisis pengambilan keputusan atau kebijakan publik, yang meliputi tiga aspek yang dikenal dengan *Three Stream Theory*, yaitu:

1. *Problem Stream*

Problem Stream adalah penjelasan terkait dengan “masalah”, yaitu hal-hal yang menjadi perhatian massa dan bisa mengubah atau mempengaruhi orang-orang. Dalam *Problem Stream* terjadi pemetaan terhadap masalah-masalah yang ada

¹ Ibid. Hlm. 105

² Paul J.Larkin Jr. 2012. *John Kingdon's "Three Streams" Theory and the Antiterrorism and Effective Death Penalty Act of 1996*. *Journal of Law and Politics*. Volume 28: Page 25-26.

baik yang dimulai dari skala kecil hingga yang sudah mencapai masa kritis.

2. *Policy Stream*

Policy Stream membahas tentang usulan kebijakan yang bermula dari adanya *single-issue* atau prakiraan yang luas oleh ahli kebijakan dari pihak-pihak yang mungkin akan kehilangan atau mendapatkan sesuatu dari undang-undang atau peraturan dan dari koalisi formal (atau informal) dari entitas terpisah yang berbagi kepentingan bersama.

3. *Politics Stream*

Politics Stream dibentuk oleh perubahan administrasi atau partai mayoritas di DPR, pensiun atau kekalahan legislator kuat, pemilihan baru, karismatik pejabat, referendum publik, dan keinginan di antara pemilih.

1.3. Metode *Agenda Setting*

³Untuk melakukan proses *Agenda Setting*, ada beberapa metode untuk mengidentifikasi masalah-masalah publik. Metode tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

a. *Back of The Envelope Calculations*

Metode ini adalah metode perhitungan kasar. Metode ini mengidentifikasi publik dengan cara mencatat pada sepotong kertas yang ada dari setiap masalah yang ditemui dari koran, televisi, radio, dan lain-lain berdasarkan asumsi yang sederhana.

b. *Quick Decision Analysis*

Metode ini adalah metode untuk menganalisa keputusan yang mungkin menggunakan sebuah proses evaluasi formal, yang mengevaluasi alternatif-alternatif yang teridentifikasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

c. *Creation of Valid Operational Definition*

Metode ini mengidentifikasi masalah publik dengan melakukan serangkaian tes validasi untuk menentukan keberadaan dan kuantitas masalah publik tersebut.

d. *Political Analysis*

Metode ini adalah metode yang digunakan untuk mengenali masalah berdasarkan analisis politik yakni yang berkaitan dengan kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan.

³ Pribadi, Op.Cit, Hlm. 29

e. *The Issue Paper/First Cut Analysis*

Metode ini adalah metode yang digunakan untuk mengenali masalah dengan memperhatikan paper, jurnal ilmiah, diskusi, dan lain-lain.

1.4 Teknik Menyusun Prioritas Masalah Publik

⁴Membuat prioritas masalah publik dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

- a. Menyusun kuesioner masalah-masalah publik

Tabel 1.2 Tabel penilaian prioritas masalah publik

No	Masalah Publik	Argumentasi	Penilaian				
			1	2	3	4	5
1.							
2.							
3.							
4.							

(Sumber: Diktat Kuliah Formulasi Kebijakan Publik, Ulung Pribadi).

- b. Menentukan populasi dan sampel *stakeholders*

Populasi dari masalah-masalah publik adalah *stakeholders* pemerintahan. Kemudian sampelnya diambil dari *stakeholders* secara proporsional untuk mewakili keseluruhan *stakeholders* tersebut.

- c. Pengolahan data dan penyimpulan prioritas masalah

Penilaian :

- 1 = tidak penting
- 2 = kurang penting
- 3 = cukup penting
- 4 = penting
- 5 = sangat penting

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai *Agenda Setting* Program OVOP ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif karena penelitian ini

⁴ Ibid. Hlm. 35

bertujuan untuk memahami secara mendalam terkait dengan *Agenda Setting Program* OVOP di Kabupaten Bantul. Peneliti mengumpulkan data-data dan fakta-fakta langsung yang ada di lapangan yakni di institusi-institusi Pemerintahan Kabupaten Bantul dan kelompok masyarakat yang terlibat di dalam *Agenda Setting* OVOP.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di Kabupaten Bantul tepatnya di BAPPEDA Kabupaten Bantul dan SKPD terkait untuk menghimpun data terkait dengan pemetaan masalah dan usulan kebijakan OVOP Kabupaten Bantul. Selanjutnya adalah DPRD Kabupaten Bantul untuk mengumpulkan data-data dan informasi mengenai proses politik perumusan OVOP dan legalisasi dokumen OVOP. Peneliti juga melakukan pengumpulan data dari UKM sasaran OVOP.

3. Unit Analisis

a. Unit Analisis Kelompok

Kelompok yang diteliti adalah kelompok OVOP Tamanmojo dan kelompok OVOP Madu Bambu yang masuk di dalam program OVOP Kabupaten Bantul.

b. Unit Analisis Organisasi

Unit analisis organisasi dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Kabupaten Bantul. Unit observasinya yaitu Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Bantul, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul, serta SKPD yakni Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Bantul yang terkait dengan program OVOP.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan yaitu jenis data primer dari instansi di Kabupaten Bantul, DPRD Bantul, dan kelompok OVOP Bantul yakni hasil wawancara dengan narasumber. Jenis data sekunder berupa artikel, tabel-tabel data kemiskinan, data desa tertinggal, draft kebijakan OVOP dan lain-lain.

b. Data Penelitian

Data penelitian ini menggunakan data kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata dan kalimat yang berupa hasil

penelitian yang ditunjukkan dalam penjelasan di dalam pembahasan.

c. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Narasumber -narasumber yang diwawancarai adalah Drs. Fauzan Mu'ariffin selaku Kepala Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat BAPPEDA Bantul; Widodo, Amd selaku Ketua Komisi B DPRD Bantul; Muji Rahayu, SH., M.Hum selaku Kepala Subbag Program Disperindagkop Bantul; Hj. Jazimah sebagai tokoh penggerak Kelompok OVOP Tamanmojo dan Parjo sebagai tokoh penggerak Kelompok OVOP Madu Bambu.

2. Observasi

Observasi yang dilakukan peneliti adalah pengamatan di lapangan dengan turun langsung ke kelompok OVOP Karang mojo dan kelompok OVOP Madu Bambu sebagai bagian dari kelompok OVOP Kabupaten Bantul.

3. Dokumentasi

Peneliti melakukan teknik pengumpulan data ini dengan menghimpun data baik dari dokumen tertulis maupun elektronik dari lembaga/institusi serta obyek lain yang terkait dengan program OVOP dan proses *Agenda Setting*. Dokumen yang dihimpun antara lain data-data kemiskinan, data desa tertinggal, profil institusi yang dijadikan tempat wawancara, *draft* kebijakan OVOP, dan lain-lain.

5. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, proses atau tahapan dalam mengolah data adalah sebagai berikut :

1. Pengelompokan data
2. Reduksi data
3. Interpretasi
4. Uji Keabsahan Data Dengan Triangulasi
5. Kesimpulan
6. Publikasi/display berupa tulisan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini adalah pembahasan terkait indikator-indikator yang dianalisa dalam Agenda Setting Program OVOP Kabupaten Bantul.

A. Metode *Agenda Setting*

Metode Agenda Setting yang digunakan dalam Program OVOP Kabupaten Bantul adalah metode *Quick Decision Analysis*. Hal ini dikarenakan program ini muncul setelah Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan proses cepat tanggap dari hasil evaluasi daerah Kabupaten Bantul yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Hasilnya dinyatakan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan Kabupaten Bantul berada di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro poor*). Profil Keluarga Miskin (GAKIN) tahun 2013 Kabupaten Bantul diketahui bahwa total KK GAKIN di Kabupaten Bantul mencapai 39.424 KK atau sekitar 14,2 persen. Sedangkan untuk Total Jiwa Miskin mencapai 122.021 jiwa atau berada pada presentase 13,5 persen.⁶

B. Teknik Menyusun Prioritas Masalah Publik Di Dalam *Agenda Setting* Program OVOP

Berdasarkan hasil analisa di lapangan ditemukan bahwa teknik penyusunan prioritas masalah publik yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul sudah sesuai dengan langkah-langkah penyusunan prioritas masalah publik. Berdasarkan hasil konsensus dan penilaian *stakeholders* di atas maka didapatkan bahwa terdapat beberapa isu di Kabupaten Bantul, yang harus segera mendapatkan perhatian dari pemerintah Kabupaten Bantul. Isu-isu tersebut antara lain:

- a. Isu pelayanan publik
Permasalahannya yaitu: Seiring dengan kemajuan jaman yang menuntut pelayanan publik menjadi lebih cepat dan responsif. Hal ini didukung dengan gerakan mengimplementasikan *Good Governance* di dalam pemerintahan.
 - b. Isu kemiskinan
Permasalahannya yaitu: Hasil evaluasi kinerja perekonomian daerah Kabupaten Bantul bahwa pengurangan kemiskinan Kabupaten Bantul masih dibawah rata-rata provinsi. Hal ini
-

menunjukkan isu kemiskinan masih menjadi isu yang sangat perlu mendapatkan perhatian pemerintah Kabupaten Bantul.

- c. Isu pemerintahan yang empatik
Permasalahannya yaitu: Kebutuhan masyarakat terhadap pemerintah yang memahami dan peduli terhadap permasalahan yang dialami masyarakat serta mampu segera merespon dan mencari jalan keluarnya.⁵

Setelah didapatkan *single-issue* berupa kemiskinan, maka kemudian Pemerintah Kabupaten Bantul kemudian merumuskan alternatif-alternatif kebijakan yang mungkin digunakan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di Kabupaten Bantul. Alternatif-alternatif kebijakan untuk mengatasi kemiskinan antara lain:

- a. Penguatan Mental

Program untuk menguatkan mental masyarakat golongan miskin diwujudkan dengan cara membagikan *sticker* ke masyarakat miskin yang bertuliskan slogan tersebut. Pembagian *sticker* ini dilakukan oleh petugas pendataan masyarakat miskin di Kabupaten Bantul yang menyebar di desa-desa dan kecamatan-kecamatan.

- b. Penguatan Kelembagaan dengan OVOP

Program ini berupa pendampingan masyarakat miskin yang dilakukan oleh tim-tim yang disebar di berbagai kecamatan dan desa di Kabupaten Bantul.⁶

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh BAPPEDA, didapatkan bahwa alternatif kebijakan berupa penguatan kelembagaan dengan program *One Village One Product* (OVOP) adalah yang paling tepat untuk diimplementasikan di Kabupaten Bantul. BAPPEDA kemudian membuat *draft* program OVOP untuk kemudian masuk ke tahap-tahap selanjutnya hingga dapat

⁵ Hasil wawancara dengan Drs. Fauzan Mu'ariffin (Kepala Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat BAPPEDA Bantul) pada 28 Desember 2015 11.46 WIB di Kantor BAPPEDA Bantul

⁶ Hasil wawancara dengan Drs. Fauzan Mu'ariffin (Kepala Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat BAPPEDA Bantul) pada 28 Desember 2015 11.46 WIB di Kantor BAPPEDA Bantul

diimplementasikan di Kabupaten Bantul sebagai program pengentasan kemiskinan.

C. Proses *Agenda Setting* Program OVOP Berdasarkan *Three Stream Theory*

Berdasarkan penelitian dan tahap-tahap pengolahan data yang sudah dilakukan oleh peneliti, kemudian didapatkan hasil analisa mengenai implementasi *Three Stream Theory* di dalam *Agenda Setting* program OVOP Kabupaten Bantul, yakni:

1. *Problem Stream*

Berdasarkan analisis peneliti mengenai aspek *Problem Stream* di dalam *Agenda Setting* program OVOP dapat diketahui bahwa pemetaan masalah yang dilakukan di Kabupaten Bantul dalam hal ini dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bantul. BAPPEDA Kabupaten Bantul menemukan bahwa masalah kemiskinan adalah masalah yang menjadi prioritas utama di Kabupaten Bantul yang perlu segera ditangani. Pemetaan masalah ini dilakukan setelah hasil evaluasi daerah dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

Maka dari itu, isu kemiskinan menjadi isu utama yang mendapatkan alokasi sumber daya publik di Kabupaten Bantul. Setelah diangkat menjadi prioritas dibandingkan masalah publik yang lain, kemudian Pemerintah Kabupaten Bantul berusaha mencari alternatif-alternatif kebijakan yang bisa diimplementasikan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pengurangan kemiskinan. Alternatif kebijakan menggunakan OVOP untuk mengentaskan kemiskinan merupakan konsep yang telah dibahas bersama oleh Sekretaris Daerah bersama dengan BAPPEDA.

2. *Policy Stream*

Single-issue yang menjadi latar belakang lahirnya Program OVOP Kabupaten Bantul adalah isu kemiskinan. Isu ini kemudian dikaji bersama oleh pihak Sekretaris Daerah bersama BAPPEDA dan SKPD-SKPD. Hasil dari kajian tersebut kemudian menjadi pedoman perumusan *draft* konsep OVOP Kabupaten Bantul. Berdasarkan hasil kajian tersebut kemudian didapatkan

konsep OVOP dengan nama Produk Andalan Setempat (PAS). Berikut ini adalah narasi dari *draft program OVOP*:

Tujuan dan indikator Program OVOP Kabupaten Bantul sebagaimana yang telah dicantumkan di *draft konsep OVOP* meliputi penetapan indikator modal kerja sebagai unsur peningkatan investasi, alat dan SDM sebagai peningkatan produktivitas, dan kelembagaan sebagai unsur untuk mendapatkan ijin atau sertifikasi maupun untuk berbadan hukum.⁷

Proses Penetapan OVOP sendiri memiliki beberapa tahapan yang harus dilaksanakan yaitu:

1. Memetakan petakan potensi dan permasalahan yang ada
2. Menemukan sasaran, sebaiknya basis desa tertinggal atau memiliki kantong kemiskinan
3. Mengupayakan Program OVOP di lokasi tersebut dikembangkan secara kelompok
4. Memilih potensi yang akan dijadikan usaha OVOP dan komunikasikan dengan warga masyarakat.
5. Mendorong dan mengembangkan potensi yang dipilih baik produksi maupun produktivitas secara terintegrasi.
6. Menguatkan kelembagaan yang ada dengan konsep pemberdayaan.
7. Membuat perencanaan usaha (*business plan*) secara terpadu.

Proposal dari kecamatan merupakan hasil konsensus bersama antara masyarakat untuk penetapan jenis usaha dan kelompok usaha mana yang akan diangkat sebagai kelompok OVOP dari desa masing-masing. Proposal dari kecamatan-kecamatan akan masuk ke BAPPEDA. BAPPEDA kemudian membuat instrumen verifikasi lapangan kemudian melakukan verifikasi terhadap proposal. Kemudian proposal yang lolos dari BAPPEDA diberikan kepada SKPD-SKPD terkait. Selanjutnya adalah penetapan kelompok-kelompok yang lolos masuk ke dalam program OVOP beserta sasaran, tujuan akhir, target, dan waktunya di dalam Surat Keputusan (SK)

⁷ Hasil wawancara dengan Drs. Fauzan Mu'ariffin (Kepala Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat BAPPEDA Bantul) pada 28 Desember 2015 11.46 WIB di Kantor BAPPEDA Bantul

Penetapan (*Project Design*). Proposal-proposal yang masuk ke BAPPEDA Kabupaten Bantul kemudian diseleksi berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 3.4
Kriteria Kelompok OVOP Kabupaten Bantul

No.	Uraian	Indikator	Tolok Ukur
1.	Program/kegiatan	Sifat usulan	Baru/lama
2.	Lokasi (desa/kecamatan)	Angka Kemiskinan	Presentase masyarakat miskin tinggi
3.	Sasaran	Jumlah KK miskin	Presentase keterlibatan masyarakat miskin tinggi
4.	Input	Dana	Sesuai/tidak
		SDM	Pengalaman/tidak
		Alat	Baru/lama
		Tempat	Bangun/sewa/milik sendiri
5.	Proses	Aspek Pengolahan	Ada/jelas
		Aspek Pasar	Ada/jelas
		Aspek Distribusi	Ada/jelas
		Aspek Keuangan	Ada/jelas
6.	Output	Jumlah unit produksi	Jumlah produk yang dihasilkan
7.	Outcomes	Target pendapatan	Jumlah produksi terjual dikalikan harga produk
8.	Cost Benefit Analysis	Perbandingan antara pendapatan dan pengeluaran (R/C ratio).	>1 baik
		Prospektif	Tingkat persaingan

(Sumber : BAPPEDA BANTUL Tahun 2013)

BAPPEDA Bantul cenderung tidak meloloskan proposal kelompok usaha yang kegiatan ekonominya belum ada atau belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan Program OVOP sendiri dipahami sebagai program yang memberdayakan dan mengembangkan kegiatan ekonomi dari

UKM-UKM yang sudah berjalan, bukan menciptakan usaha-usaha yang baru.⁸

3. *Politics Stream*

Dari segi *Politics Stream*, program OVOP ini mendapatkan dukungan yang bulat pada saat pembahasan program tersebut antara Bupati, Sekretaris Daerah, BAPPEDA dan SKPD-SKPD dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul. Semua fraksi yang ada di DPRD Bantul menyepakati bahwa program OVOP ini rasional dari segi urgensi maupun konsepnya. Mengingat masalah kemiskinan di Kabupaten Bantul harus ditangani segera.⁹ Semua fraksi menyetujui program OVOP ini. Selama suatu program itu tujuannya untuk memajukan Kabupaten Bantul, maka DPRD pasti mendukung. Program OVOP ini dibahas di DPRD Bantul bersamaan dengan pembahasan RAPBD di tahun tersebut. Sistem penganggaran program OVOP ini dimulai dari bawah. Pertama, Rapat pembahasan KUA-PPAS Kabupaten Bantul. Setelah menyepakati KUA-PPAS maka selanjutnya adalah proses masuknya anggaran OVOP di dalam APBD. Berdasarkan verifikasi SKPD terhadap kelompok-kelompok OVOP, maka akan diketahui apa yang menjadi kebutuhan kelompok tersebut. Kebutuhan-kebutuhan kelompok OVOP seperti alat produksi, pengemasan, dan lain-lain akan direkap dan dicantumkan di dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD-SKPD yang membina kelompok-kelompok OVOP tersebut.

Program OVOP Kabupaten Bantul berada di dalam pengawasan Komisi B DPRD Bantul. Komisi B DPRD Bantul memiliki bidang tugas Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Ketahanan Pangan, Keuangan dan Aset Daerah, Perpajakan, Retribusi, Perbankan, Perusahaan Daerah/Patungan, Penanaman Modal, Pariwisata, Seni, Kebudayaan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Perekonomian. Sehingga program OVOP sudah tepat berada di bawah pengawasan Komisi B DPRD Bantul.

⁸ Hasil wawancara dengan Drs. Fauzan Mu'ariffin (Kepala Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat BAPPEDA Bantul) pada 28 Desember 2015 11.46 WIB di Kantor BAPPEDA Bantul

⁹ Pernyataan narasumber Widodo, A.Md. (Ketua Komisi B DPRD Bantul) pada 18 November 2015 11.32 WIB di kantor DPRD Bantul.

Pada proses pengawasan program OVOP ini, Komisi B DPRD Bantul melakukan pengamatan dan observasi di lapangan terkait dengan pelaksanaan program OVOP. Komisi B juga menindaklanjuti apabila ada kesalahan-kesalahan atau bahkan penyelewengan terkait dengan program OVOP ini dengan memanggil SKPD yang membina atau BAPPEDA Bantul untuk meminta penjelasan.¹⁰

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa dari penelitian tentang *Agenda Setting* Program *One Village One Product* (OVOP) Kabupaten Bantul yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Metode *Agenda Setting* Program OVOP Kabupaten Bantul adalah metode *Quick Decision Analysis*. Hal ini dibuktikan dimana Pemerintah Kabupaten Bantul menggunakan sistem evaluasi formal terhadap alternatif-alternatif kebijakan yang mungkin untuk mengatasi masalah publik yang menjadi prioritas, yaitu masalah kemiskinan.
2. Teknik Penyusunan Prioritas Masalah Publik yang digunakan Pemerintah Kabupaten Bantul sudah sesuai, dalam hal ini setelah melewati tahap penyusunan prioritas masalah publik, penilaian oleh *stakeholders* terhadap alternatif kebijakan, dan dilanjutkan dengan penyimpulan prioritas masalah yang menjadikan masalah kemiskinan sebagai prioritas yang kemudian diatasi dengan alternatif kebijakan berupa program OVOP ini.
3. Proses *Agenda Setting* Program OVOP Kabupaten Bantul telah memenuhi aspek-aspek dalam Three Stream Theory yang dikemukakan oleh John Kingdon.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku :

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Metodologi penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.
Hamidi. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang : UMM Press.

¹⁰ Pernyataan Pernyataan narasumber Widodo, A.Md. (Ketua Komisi B DPRD Bantul) pada 18 November 2015 11.32 WIB di kantor DPRD Bantul.

- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nasution, S.1996. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Parsons, Wayne. 2011. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisa Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Stone, Deborah. 2002. *Policy Paradox: The Art of Political Decision Making (Revised Edition)*. New York: W.W. Norton & Company.
- Syafiie, Inu Kencana, dkk. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Sumber dokumen :

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sumber jurnal:

- Jr, Paul J.Larkin. 2012. *John Kingdon's "Three Streams" Theory and the Antiterrorism and Effective Death Penalty Act of 1996*. Journal of Law and Politics. Volume 28: Page 25-26.
- Suharta, Rudi. April 2014. *Pengembangan Produk Andalan Dengan Pendekatan One Village One Product (OVOP) Di Kecamatan Imogiri*. Jurnal Riset Daerah. Volume 13, No.1: Page 3-4. Ditemukan pada <http://jrd.bantulkab.go.id> 18 September 2015 22.15 WIB

Sumber artikel:

Magriasti, Lince. 2011. *Arti Penting Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik di Daerah: Analisis Dengan Teori Sistem David Easton*. *Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah*.

Sumber internet :

- http://a-research.upi.edu/operator/upload/t_pd_0908073_chapter3.pdf
diakses pada 10 september 2015 18.00 WIB
- http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/491/jbptunikompp-gdl-riaseptian-24550-4-unikom_r-i.pdf diakses pada 10 september 2015 22.00 WIB

- <http://eprints.uny.ac.id/8586/3/bab%20%20-%2005402244038.pdf>
diakses pada 10 september 2015 19.00 WIB
- <http://jrd.bantulkab.go.id> diakses pada 18 september 2015 19.00 WIB
- http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2013/10/pustaka_unpad_kebijakan_publik.pdf diakses pada 10 september 2015 18.00 WIB
- <http://www.hfrp.org/evaluation/the-evaluation-exchange/issue-archive/advocacy-and-policy-change/evaluation-based-on-theories-of-the-policy-process> diakses pada 18 september 2015 19.30 WIB
- http://www.menpan.go.id/jdih/permen-kepmen/permenpan-rb/file/320-permenpan_-2007-no-004 diakses pada 10 september 2015 19.00 WIB
- <http://www.risbinkes.litbang.depkes.go.id/2015/wp-content/uploads/2013/02/sampling-dan-besar-sampel> diakses pada 10 september 2015 20.00 wib.
- https://en.wikipedia.org/wiki/One_Village_One_Product_Movement
diakses pada 23 April 2015 20.00 WIB
- <https://www.investor.co.id> edisi Kamis 15 Agustus 2013 diakses pada 6 November 2015 12.00 WIB
- <http://krjogja.com/read/212384/pemkab-bantul-siap-hadapi-aec-2015.kr>
Diakses pada 23 April 2015 18.30 WIB
- <http://simreg.bappenas.go.id/> diakses 7 Desember 2015 11.00 WIB

Sumber lain:

- BAPPEDA Kabupaten Bantul. Materi *Rapat Koordinasi Ovop: TKPK Kabupaten Bantul*. Ditemukan pada: <http://tkpk.bantulkab.go.id> 6 November 2015 19.00 WIB
- Deputi Menteri Bidang Pengkajian Sumber daya UKMK Kementerian Koperasi dan UKM RI. *Materi kuliah umum: Pengembangan Produk Unggulan Daerah Melalui Pendekatan One Village One Product*. Ditemukan pada: <http://www.stekpi.ac.id>. 18 September 2015 11.00 WIB
- Pribadi, Ulung. 2013. *Diktat Formulasi Kebijakan Publik*. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul. *Materi pelatihan: OVOP*. Ditemukan pada: <http://jrd.bantulkab.go.id> 18 September 2015 22.10 WIB
- Susilana, Rudi. Modul 6 Populasi dan Sampel. Ditemukan pada: http://file.upi.edu/Direktori/dual-modes/penelitian_pondidikan/
-